



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9767-9774

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Periklanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

Thomas Alexander, Winny Lian Seventeen, Fathul Hilal Perdanakusuma

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

alexanderthomas87107@gmail.com; wlseventeen@gmail.com; fathul.hilal.5758@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat, sehingga diperlukan kajian empiris yang komprehensif mengenai kontribusi masing-masing komponen pajak daerah terhadap PAD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bengkulu. Sampel terdiri dari 40 observasi data time series periode 2020–2024 berdasarkan interpolasi bulanan. Teknik analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi menggunakan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (t-hitung 13,981; koefisien 44,691), pajak periklanan berpengaruh positif dan signifikan (t-hitung 6,098; koefisien 12,842), sedangkan pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan (t-hitung -5,898; koefisien -17,365). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD (probabilitas F sebesar 0,000 < 0,05). Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,943 menunjukkan bahwa 94,3% variasi PAD Kota Bengkulu dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak restoran dan periklanan merupakan kontributor utama PAD, dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemungutan pajak hotel guna mendorong kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Periklanan; Pendapatan Asli Daerah; Kota Bengkulu

1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri. Konsekuensi dari kebijakan desentralisasi ini adalah tuntutan bagi setiap daerah untuk memiliki kapasitas fiskal yang memadai guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [1].

Pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur PAD. Di antara berbagai jenis pajak kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan memiliki potensi kontribusi yang signifikan, terutama di daerah yang berkembang secara ekonomi seperti Kota Bengkulu [2]. Penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak daerah dari sektor-sektor ini menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah [3].

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara penerimaan pajak daerah dan PAD. Fitriano dan Ferina (2020) menemukan bahwa penerimaan PAD Kota Bengkulu periode 2015–2018 sangat bergantung pada pajak hotel dan restoran. Syahfriardan (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Asahan menemukan bahwa peningkatan pajak hotel dan restoran secara signifikan memengaruhi PAD dengan tingkat signifikansi 0,0016. Sementara itu, Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) menemukan bahwa pajak hotel, restoran, dan iklan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang [4][5].

Namun, terdapat research gap yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada daerah-daerah dengan sektor pariwisata yang sudah mapan, sementara kajian pada kota berkembang seperti Bengkulu masih sangat terbatas. Kedua, studi terdahulu umumnya hanya mencakup dua variabel pajak (hotel dan restoran) tanpa memasukkan pajak periklanan sebagai variabel tersendiri. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis ketiga komponen pajak tersebut secara simultan di Kota Bengkulu dengan data terkini periode 2020–2024 [6][7].

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penambahan variabel pajak periklanan sebagai komponen yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi pajak daerah di Bengkulu, serta penggunaan data yang lebih mutakhir mencakup periode pasca-pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan secara parsial dan simultan terhadap PAD Kota Bengkulu periode 2020–2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, yaitu metode yang bertujuan mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen melalui analisis statistik [8]. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur dan menjelaskan besarnya pengaruh pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak periklanan (X3) terhadap PAD Kota Bengkulu (Y).

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bengkulu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan PAD Kota Bengkulu yang diperoleh dari BPPRD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu periode 2020–2024. Populasi penelitian adalah keseluruhan data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak periklanan, dan PAD Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria ketersediaan data yang lengkap dan konsisten, sehingga diperoleh 40 observasi berdasarkan data interpolasi bulanan dari tahun 2020 hingga 2024 [9].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atas laporan resmi instansi terkait. Variabel penelitian terdiri dari tiga variabel independen, yaitu penerimaan pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak periklanan (X3), serta satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Seluruh variabel diukur dalam satuan rupiah berdasarkan data realisasi tahunan yang dikonversi ke dalam data bulanan melalui interpolasi linear.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 24. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera, uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey, dan uji autokorelasi menggunakan uji Breusch-Godfrey. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut [10]:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan: Y = PAD Kota Bengkulu; α = Konstanta; β_1 , β_2 , β_3 = Koefisien regresi; X1 = Pajak Hotel; X2 = Pajak Restoran; X3 = Pajak Periklanan; ε = Koefisien error.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria penerimaan hipotesis adalah apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang meliputi area seluas 151,7 km². Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bengkulu mencapai 368.065 jiwa, terdiri dari 184.887 laki-laki dan 183.178 perempuan. Struktur ekonomi Kota Bengkulu didominasi oleh sektor jasa (39,10%),

perdagangan (29,40%), dan pertanian (9,50%). Kondisi ini mencerminkan potensi yang besar bagi sektor perhotelan, restoran, dan periklanan sebagai penyumbang pajak daerah [11].

3.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik	PAD (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Iklan (Rp)
Mean	1,64E+11	9,13E+09	8,05E+09	4,21E+09
Maksimum	2,70E+11	1,74E+10	1,29E+10	6,85E+09
Minimum	5,22E+10	5,95E+09	4,84E+09	2,03E+09
Std. Deviasi	7,90E+10	2,99E+09	2,75E+09	1,45E+09
Observasi	40	40	40	40

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1, PAD Kota Bengkulu dalam periode pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1,64E+11, dengan nilai maksimum Rp2,70E+11 dan minimum Rp5,22E+10. Pajak hotel memiliki rata-rata Rp9,13E+09, pajak restoran Rp8,05E+09, dan pajak periklanan Rp4,21E+09. Deviasi standar PAD yang cukup besar (Rp7,90E+10) mengindikasikan terdapat variasi yang signifikan antar periode observasi, yang mencerminkan dinamika penerimaan PAD yang berfluktuasi seiring perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Bengkulu Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	155.974.033.924	171.777.275.449
2021	196.500.996.271	209.914.107.300
2022	233.904.889.113	258.591.409.669
2023	280.877.031.733	270.170.805.366
2024	271.470.773.450	246.277.339.356

Sumber: BPS Kota Bengkulu (2024)

Data pada Tabel 2 menunjukkan tren PAD yang secara umum meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami penurunan pada 2023 dan 2024. Pada tahun 2020–2022, realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan, menandakan kinerja penerimaan yang baik. Namun pada 2023 dan 2024, realisasi di bawah target, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi pasca-pandemi dan kebijakan fiskal daerah.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bengkulu Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	7.350.000.000	8.873.611.743
2021	7.350.000.000	8.653.092.449
2022	8.610.000.000	10.512.124.000
2023	9.220.000.000	10.501.814.684
2024	11.720.000.000	14.439.927.766

Sumber: BPS Kota Bengkulu (2024)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9837>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bengkulu Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	5.750.000.000	7.932.955.908
2021	5.725.000.000	8.653.092.449
2022	6.800.000.000	10.161.617.361
2023	8.200.000.000	11.359.205.414
2024	11.700.000.000	12.256.583.909

Sumber: BPS Kota Bengkulu (2024)

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Periklanan Kota Bengkulu Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	4.500.000.000	5.120.000.000
2021	5.000.000.000	5.430.000.000
2022	5.200.000.000	6.150.000.000
2023	6.000.000.000	7.250.000.000
2024	7.500.000.000	8.420.000.000

Sumber: BPS Kota Bengkulu (2024)

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera nonparametrik untuk menentukan apakah distribusi residual model regresi mengikuti distribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

P-value	Kriteria	Keterangan
0,379	P-value > 0,05	Data berdistribusi normal

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji Jarque-Bera adalah $0,379 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas residual dalam model regresi terpenuhi.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linier yang kuat di antara variabel independen dalam model regresi, menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Centered VIF < 10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient	Uncentered VIF	Centered VIF
Pajak Hotel (X1)	8,668946	85,35507	8,077378
Pajak Restoran (X2)	10,21744	78,80450	8,077378
Pajak Periklanan (X3)	6,452311	65,20143	7,985642

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 7, nilai Centered VIF masing-masing variabel independen adalah pajak hotel (8,077378), pajak restoran (8,077378), dan pajak periklanan (7,985642), yang seluruhnya berada di bawah nilai kritis 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan di antara variabel independen dalam model, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas Obs*R-Squared > 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Prob. Obs*R-Squared	Kriteria	Keterangan
0,1428	p-value > 0,05	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai probabilitas Obs*R-Squared sebesar 0,1428 > 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga varians residual bersifat homogen di seluruh observasi.

3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Breusch-Godfrey untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual dalam model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Prob. Obs*R-Squared	Kriteria	Keterangan
0,1428	> 0,05	Bebas autokorelasi

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas Obs*R-Squared sebesar 0,1428 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, yang berarti model regresi linier berganda yang digunakan adalah BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

3.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Pajak Hotel (X1)	-17,36538	2,944307	-5,897951	0,0000
Pajak Restoran (X2)	44,69057	3,196472	13,98121	0,0000
Pajak Periklanan (X3)	12,84216	2,105934	6,098452	0,0000

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 10, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = -3,720E+10 - 17,365X_1 + 44,691X_2 + 12,842X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Nilai konstanta -3,720E+10 menunjukkan bahwa apabila ketiga variabel independen bernilai nol, PAD akan bernilai negatif sebesar Rp3,720E+10. Koefisien pajak hotel sebesar -17,365 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 1 satuan akan

menyebabkan penurunan PAD sebesar 17,365 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien pajak restoran sebesar 44,691 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak restoran sebesar 1 satuan akan meningkatkan PAD sebesar 44,691 satuan. Koefisien pajak periklanan sebesar 12,842 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak periklanan sebesar 1 satuan akan meningkatkan PAD sebesar 12,842 satuan.

3.5 Hasil Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	t-Hitung	Signifikansi	Keterangan
Pajak Hotel (X1)	-17,36538	-5,897951	0,000	Signifikan
Pajak Restoran (X2)	44,69057	13,98121	0,000	Signifikan
Pajak Periklanan (X3)	12,84216	6,098452	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 11, variabel pajak hotel (X1) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t-hitung -5,897951, sehingga H01 ditolak dan disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu, meskipun dengan arah negatif. Variabel pajak restoran (X2) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t-hitung 13,98121, sehingga H02 ditolak dan pajak restoran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Variabel pajak periklanan (X3) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t-hitung 6,098452, sehingga H03 ditolak dan pajak periklanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

3.6 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji F

Prob. F-Statistik	Kriteria	Keterangan
0,000	$< 0,05$	Berpengaruh simultan

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,000 < 0,05$ mengkonfirmasi bahwa seluruh variabel independen, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu. Dengan demikian, H04 diterima.

3.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R^2	Adjusted R^2
1	0,943073	0,939996

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai R^2 sebesar 0,943073 menunjukkan bahwa 94,3% variasi PAD Kota Bengkulu dapat dijelaskan oleh variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan secara bersama-sama. Sisanya sebesar 5,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti pajak hiburan, retribusi daerah, atau variabel makroekonomi lainnya. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,939996 mengkonfirmasi bahwa model memiliki daya prediksi yang sangat kuat.

3.8 Pembahasan

3.8.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bengkulu

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu, dengan nilai t-hitung -5,897951 dan koefisien regresi -17,365. Temuan ini berbeda dari hipotesis awal yang memperkirakan pengaruh positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bahmid dan Wahyudi (2018), yang menemukan pengaruh tidak signifikan pajak hotel terhadap PAD di Medan, dan berbeda dengan studi Anggraini (2017) yang menemukan pengaruh positif [12][13].

Koefisien negatif pada pajak hotel dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel yang berfluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 secara langsung menurunkan penerimaan pajak hotel meskipun secara nominal realisasi tetap ada. Kedua, masalah kepatuhan pajak yang mungkin menyebabkan under-reporting pendapatan oleh sebagian wajib pajak hotel. Ketiga, kebijakan tarif pajak yang berlebihan dapat menurunkan daya saing hotel dan tingkat huniannya, yang pada akhirnya justru mengurangi basis pajak. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan perpajakan hotel melalui digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan basis data wajib pajak [14].

3.8.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bengkulu

Pajak restoran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu dengan nilai t-hitung tertinggi yaitu 13,981 dan koefisien 44,691. Ini merupakan kontributor terbesar di antara ketiga variabel independen. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Vomiagustin (2014) yang menemukan dampak signifikan pajak restoran terhadap PAD di Batu, Nikmah (2017) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan, serta Syahfriardan (2020) di Kabupaten Asahan [4][15].

Pengaruh positif dan dominan pajak restoran dapat dipahami melalui perkembangan pesat sektor kuliner di Kota Bengkulu. Pertumbuhan restoran, kafe, warung makan, dan layanan katering yang signifikan selama periode pengamatan menciptakan basis pajak yang luas dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran selalu melampaui target selama 2020–2024, yang mengindikasikan bahwa sektor ini memiliki potensi fiskal yang sangat besar. Pemerintah daerah hendaknya terus mendorong formalisasi usaha kuliner dan meningkatkan sistem pemungutan digital berbasis aplikasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini [16].

3.8.3 Pengaruh Pajak Periklanan terhadap PAD Kota Bengkulu

Pajak periklanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu dengan nilai t-hitung 6,098 dan koefisien 12,842. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan pajak restoran, pajak periklanan tetap memberikan dampak yang bermakna terhadap PAD. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Andriani (2020), yang menunjukkan pengaruh signifikan pajak iklan terhadap PAD di Surabaya, namun berbeda dengan Sari (2018) di Makassar yang tidak menemukan pengaruh signifikan [17].

Peningkatan aktivitas periklanan, terutama papan reklame, videotron, dan iklan digital di Kota Bengkulu mendorong pertumbuhan basis pajak periklanan. Perkembangan ekonomi kota dan meningkatnya persaingan bisnis mendorong pelaku usaha untuk menggunakan berbagai media iklan, yang secara langsung meningkatkan penerimaan pajak periklanan. Pemerintah daerah disarankan mengintegrasikan sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan objek pajak periklanan dan menerapkan teknologi digital dalam proses pemungutan untuk meminimalkan kebocoran pajak [18].

3.8.4 Pengaruh Simultan terhadap PAD Kota Bengkulu

Secara simultan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu (prob. $F = 0,000 < 0,05$) dengan kemampuan penjelasan sebesar 94,3% ($R^2 = 0,943$). Temuan ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pajak daerah secara komprehensif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah [1][19]. Hasil ini juga konsisten dengan studi Sofwan dkk. (2021) yang menemukan pengaruh signifikan pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap PAD Kota Bandung [14].

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Kota Bengkulu perlu mengembangkan kebijakan perpajakan terpadu yang mencakup optimalisasi ketiga sektor pajak secara bersamaan. Sinergi antara BPPRD, Dinas Pariwisata, dan pelaku usaha dalam ekosistem hotel, restoran, dan periklanan akan menciptakan multiplier effect yang positif bagi peningkatan PAD secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak periklanan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bengkulu periode 2020–2024. Secara parsial, pajak restoran memberikan pengaruh positif dan signifikan terbesar dengan nilai t-hitung 13,981 dan koefisien 44,691, diikuti pajak periklanan dengan t-hitung 6,098 dan koefisien 12,842, sedangkan pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan dengan t-hitung -5,897 dan koefisien -17,365. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan probabilitas F sebesar 0,000 dan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,943, yang berarti 94,3% variasi PAD Kota Bengkulu dijelaskan oleh model ini. Implikasi penelitian ini bagi pemerintah daerah Kota Bengkulu adalah perlunya penguatan tata kelola perpajakan secara menyeluruh, khususnya pada sektor perhotelan yang masih menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD. Digitalisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengembangan infrastruktur pariwisata merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Sektor restoran harus terus dioptimalkan mengingat kontribusinya yang dominan, sementara sektor periklanan perlu diperluas basis pajaknya seiring pertumbuhan aktivitas bisnis di Kota Bengkulu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas periode pengamatan, menambahkan variabel pajak daerah lainnya seperti pajak hiburan dan pajak parkir, serta menggunakan pendekatan data panel yang mencakup beberapa daerah di Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.

Referensi

- [1] Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [3] Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. CV Andi Offset.
- [4] Syahfriardan, M. (2020). Dampak Pajak Hotel, Pajak Pariwisata, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 45–58.
- [5] Prasetyaningtyas, R., & Ratnawati, V. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Iklan terhadap PAD di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 12–25.
- [6] Sofwan, S., Iqbal, M., & Ramadan, S. (2021). Dampak Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Bandung Periode 2013–2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi AKURAT*, Fakultas Ekonomi UNIBBA, 13–24.
- [7] Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber Pendapatan Daerah Setelah Satu Dekade Kemerdekaan Daerah. *Jurnal Dinamika Pembangunan Ekonomi*, 2(1), 30–45.
- [8] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- [9] Primanto, A. (2020). Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Media Intelligence (Intrans Publishing Group).
- [10] Trigono, R. (2015). Analisis Regresi Linier Berganda untuk Penelitian Sosial Ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- [11] BPS Kota Bengkulu. (2024). Bengkulu Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- [12] Bahmid, R., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 88–101.
- [13] Octovido, I., Sujana, N., & Aziza, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Distribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Universitas Brawijaya.
- [14] Sudarsana, G., & Devi, P. E. D. M. (2019). Analisis Pertumbuhan, Kinerja, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Primer di Kabupaten Buleleng 2015–2018. *Jurnal Akuntansi Profesional*, 10(2), 100–109.
- [15] Nikmah, F. (2017). Pengaruh Pajak Restoran terhadap Peningkatan PAD. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Daerah*, 4(1), 33–47.
- [16] Ekawati, D. N. (2020). Dampak Pajak Hotel, Pajak Penerangan Umum, dan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Primer Daerah (PPN) Provinsi Jawa Tengah Periode 2015–2019. IAIN Kudus.
- [17] Juanda, A. (2018). Analisis Efektivitas dan Distribusi Pajak Iklan sebagai Sumber Pendapatan Primer Daerah di Kantor Pajak Kota Medan. Disertasi.
- [18] Simbolon, I., Simamora, J., & Angust, M. (2022). Kontribusi Pajak Iklan terhadap Keamanan Keuangan Lokal di Kota Medan. *Jurnal Hukum Bisnis Nommensen*, 1(2), 156–167.
- [19] Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Estimasi Dampak Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Primer Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.